

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Reky Candra Wirawan
NIM 14.0102.0091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh :
Reky Candra Wirawan
NIM 14.0102.0091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Reky Candra Wirawan

NPM 14.0102.0091

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **15 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.

Pembimbing I

Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Tim Penguji

Barkah Suminto, S.E., M.Sc.

Ketua

Wawan Sadyo N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

05 SEP 2018

Dra. Marlinus Kusuma, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reky Candra Wirawan

NIM : 14.0102.0091

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Reky Candra Wirawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 21 Oktober 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Perumahan Girimulyo, Jl. Sunan Bonang
IA/19, Jurangombo Selatan, Magelang
Alamat Email : Reqcandra@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (2002-2008) : SD Negeri Jurangombo 4 Magelang
SMP (2008-2011) : SMP Negeri 6 Magelang
SMA (2011-2014) : SMA Negeri 5 Magelang
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Wakil Ketua MPK SMA Negeri 5 Magelang
- Komandan Lapangan PASPAMA SMA Negeri 5 Magelang
- Koordinator Divisi Vokal UKM Musik Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Kerja :

- Marketing Sahara Year Book Maker

Magelang, 31 Agustus 2018
Peneliti



Reky Candra Wirawan
NIM. 14.0102.0091

Motto

Gantungkanlah apa yang menjadi cita-citamu kepada Allah, bila kamu jatuh Allah akan menolongmu, bila kamu terjatuh kembali Allah akan menolongmu kembali, dan bila kamu terjatuh kembali maka Allah akan selalu menolongmu.

(Reky Candra Wirawan)

Ingatlah kepada-Ku, Aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukur kepadaku, jangan kalian kufur.

(Q.S. Al Baqarah : 152)

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al Baqarah : 286)

Jangan kamu kehilangan harapan dan jangan pula kamu bersedih hati.

(Q.S. Ali Imran : 139)

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.

(HR. Muslim)

Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar.

(Q.S. Ali Imran : 146)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahman dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi oleh penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing I dan Kepala Program Studi Akuntansi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Anissa Hakim P, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Farida, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik Akuntansi 14B yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu dan membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga tercinta, terutama Ibu dan Bapak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, dan doa.
8. Seluruh pegawai OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden dalam skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Magelang, 31 Agustus 2018
Peneliti



Reky Candra Wirawan
NIM. 14.0102.0091

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	iiix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori	11
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	22
C. Perumusan Hipotesis	24
D. Model Penelitian	35

BAB III METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel	36
B. Data Penelitian	36
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	38
D. Metoda Analisis Data	44
E. Pengujian Hipotesis.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif Data	Error! Bookmark not defined.
B. Statistik Deskriptif Responden.....	Error! Bookmark not defined.
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
E. Analisa Regresi Linier Berganda	59
F. Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Keterbatasan.....	81
C. Saran.....	82
Daftar Pustaka	83
Lampiran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Profil Responden.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas.....	59
Tabel 4.6 Koefisien Regresi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7 Uji R^2	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.8 Uji F	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.9 Uji t.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	35
Gambar 3.1 Nilai Kritis Uji F.....	49
Gambar 3.2 Uji Statistik t.....	50
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Variabel Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Variabel Karakteristik Kualitatif terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Variabel Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.5 Nilai Kritis Uji t Variabel Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.6 Nilai Kritis Uji t Variabel Sumber Daya Manusia terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.7 Nilai Kritis Uji t Variabel Tekanan Eksternal terhadap Transparansi Laporan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.8 Nilai Kritis Uji t Variabel Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Rekapitulasi Jumlah Sampel	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Tabulasi Hasil Pengisian Kuesioner ...	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Output SPSS	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Pengujian Validitas Setelah Penghapusan Item Tidak Valid	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas Sebelum Penghapusan Item Tidak Valid	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7 Bukti Penyebaran Kuesioner	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang)

Oleh :

**Reky Candra Wirawan
NIM. 14.0102.0091**

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. (Mardiasmo, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, pengendalian internal, tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan sumber daya manusia terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di OPD Kota Magelang dengan teknik pemilihan sampel *purposive sampling* sebanyak 109 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis. Hasil uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* sebesar 0,730 (73%). Hasil penelitian memperoleh hasil bahwa karakteristik kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, sumber daya manusia, dan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Transparansi, Laporan keuangan, Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era pemerintahan pada saat ini sudah sejak lama menerapkan sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah dapat menciptakan suatu keefisienan dan keefektifitasan pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Tidak lepas dari otonomi daerah, tindakan korupsi justru masih marak terjadi di Indonesia. Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menunjukkan adanya 482 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 (Kompas.com).

Hasil studi Chetwynd, *et.al* (2003) "*Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*" mengungkapkan bahwa korupsi memiliki konsekuensi secara langsung yang memengaruhi tata kelola pemerintahan dan juga perekonomian suatu negara. Meningkatnya korupsi pada suatu negara dapat menurunkan investasi terhadap sektor perekonomian, menciptakan distorsi pasar, dan merusak persaingan.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Pasal 7 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bagaimana Badan Publik harus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan kata lain yaitu transparansi publik. Pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan

bahwa (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Transparansi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat dari hasil laporan audit BPK RI salah satunya. Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2012, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang akhirnya telah berhasil memperoleh kembali hasil audit keuangan yang baik menurut auditor BPK. Menurut informasi yang disampaikan pada *website* milik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Magelang, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016. Untuk tahun 2012 hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang memperoleh hasil audit Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, informasi ini diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017 BPK RI.

Atas diraihnya opini tersebut Pemerintah Kota Magelang meyakini akan memperoleh dana segar sebesar Rp 5 miliar sebagai insentif. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga memperoleh 2 kategori penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yaitu penghargaan untuk kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Regional Jawa dan Kondisi Keuangan Daerah Terbaik Regional Jawa pada

tahun 2017. Dari informasi tersebut menarik untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan transparansi laporan keuangan yang diaplikasikan pada Pemerintah Daerah Kota Magelang sehingga memperoleh opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Namun, lain halnya dengan hasil audit yang diberikan oleh BPK RI. Transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Magelang dirasa masih belum dilakukan secara maksimal. Seperti yang terjadi saat ini laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang masih cukup susah untuk diakses secara *online* oleh masyarakat. Sehingga ini menjadikan suatu kekurangan, karena pada era masa kini kecanggihan teknologi informasi seharusnya sudah dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi keuangan kepada publik, karena tujuan dibuatnya laporan keuangan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan saja, tetapi masyarakat juga membutuhkannya. Serta memiliki hak untuk mengetahui

Penelitian terdahulu terkait transparansi laporan keuangan telah banyak dilakukan akan tetapi beberapa hasil penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fardian (2014) di SKPD Pemerintah Kota Padang, memperoleh hasil bahwa faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian Masruroh & Praptyo

(2015) yang dilakukan di SKPD Pemerintah Kota Mojokerto. Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kapasitas sumber daya berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Purnamasari dan Handayani (2015) yang dilakukan di SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang memperoleh hasil bahwa sumber daya manusia dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Amelia AS (2015) yang melakukan penelitian di SKPD Kota Pekanbaru, memperoleh hasil bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi.

Penelitian Apriliani, dkk. (2015) di SKPD Kabupaten Klungkung, memperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2016) di SKPD Kabupaten Pelalawan, yang memperoleh hasil bahwa tekanan eksternal, komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017) di SKPD Kabupaten Magelang, memperoleh hasil bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif. Sedangkan aksesibilitas dan

penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2015) dan Andriyani (2016).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian Yuliani (2017) dengan persamaan penelitian menguji kembali variabel pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal atau dapat dikatakan dari sisi laporan keuangannya. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **pertama**, menambahkan variabel sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen yang merupakan hasil penelitian Purnamasari dan Handayani (2015). Alasan ditambahkannya variabel sumber daya manusia adalah karena para pegawai OPD di Kota Magelang dituntut untuk memiliki *skill* dalam mengolah pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi. Mulai tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang melakukan terobosan pengalihan sistem pelaporan keuangan dari sistem manual ke pemanfaatan teknologi informasi untuk merealisasikan keterbukaan informasi yang lebih baik. Aspek-aspek yang diharapkan terealisasi melalui pemanfaatan teknologi tersebut di antaranya adalah *e-budgeting* khusus, *e-planning*, dan *e-reporting* (jogja.tribunnews.com). Terobosan ini tentunya menuntut para pegawai di dalam instansi terkait untuk mampu melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Variabel tekanan eksternal ditambahkan karena suatu tekanan eksternal dapat menyebabkan anggota organisasi atau pegawai

melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, salah satu hal yang menjadi aspek tekanan eksternal adalah peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Ketika para pegawai melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan daerah maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi agar tujuan pemerintah pusat dapat tercapai. Variabel komitmen manajemen ditambahkan dengan alasan bahwa suatu komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan. Komitmen manajemen dapat dicontohkan seperti seberapa patuh pegawai dalam organisasi tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau seberapa tinggi komitmen pegawai untuk menjunjung transparansi dalam pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

Kedua, objek penelitian dilaksanakan di OPD Pemerintah Kota Magelang. Alasan memilih OPD Pemerintah Kota Magelang karena pada tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang memperoleh hasil audit WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 (www.magelangkota.go.id). Sehingga atas perolehan opini WTP tersebut transparansi Pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan baik. Alasan lainnya adalah karena masih sulitnya masyarakat untuk mengakses laporan keuangan secara online melalui website. Maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu secara lebih spesifik mengenai transparansi

laporan keuangan di OPD Pemerintah Kota Magelang sehingga memperoleh hasil audit WTP dari sisi variabel-variabel yang akan diuji.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
2. Apakah karakteristik kualitatif berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
3. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
5. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
6. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?
7. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik kualitatif terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi laporan keuangan di OPD Kota Magelang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi agar menjadikan suatu ilmu dan wawasan serta bagi peneliti dapat menjadi suatu tambah pengetahuan terhadap transparansi khususnya di bidang akuntansi sektor publik, yaitu pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah-pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat memberikan suatu informasi mengenai apa saja faktor yang dapat meningkatkan transparansi laporan keuangannya dan menentukan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang konsep dasar teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang diteliti, yang berisi telaah teori, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menerangkan metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang berisi tentang populasi dan sampel,

data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang pembahasan yang diteliti dipecahkan. Berisi tentang statistik deskriptif variabel penelitian, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut “*nexus of contract*” (Yuliani, 2017). Purnamasari & Handayani (2015), dalam teori keagenan (*agency theory*), masalah agensi muncul ketika hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat memengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Upaya mengatasi masalah keagenan yang akan dilakukan dapat mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) yang

akan ditanggung oleh kedua belah pihak baik *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi 3 (tiga) yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Dalam pemerintahan masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan

stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Purnamasari & Handayani, 2015).

2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut Tyler (1990) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible* dan insentif yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan. Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Hal ini dapat

dikaitkan dengan tekanan eksternal yang muncul dari pimpinan pusat, sehingga diharapkan para pegawai dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan komitmen normatif melalui moralitas personal dapat dikaitkan dengan komitmen manajemen, di mana jika seseorang sudah memasuki suatu organisasi maka harus mematuhi peraturan yang telah disepakati sebagai wujud komitmen manajemen. Kemudian perspektif instrumental dapat dikaitkan dengan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap pegawai. Dimana pegawai akan bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan harapan agar mendapatkan gaji yang pantas.

3. Transparansi Laporan Keuangan

Menurut Sabarno (2008) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di mana mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- b. Sebagai upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan *good governance* yang berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik. Prinsip transparansi dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu komunikasi kepada publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya dapat terpenuhi apabila pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki kinerjanya menuju pemerintah dan tata kelola yang lebih baik (Purnamasari & Handayani, 2015).

4. Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 menjelaskan tentang Penyajian Laporan Keuangan. Tujuan PSAP 01 adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Yuliani, 2017).

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Yuliani (2017), menyatakan bahwa berdasarkan PSAP No. 01, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

6. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Apriliani, dkk. (2015) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Menurut Rohman dalam Andriyani (2016), aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat

lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan dapat diartikan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

7. Pengendalian Internal

Rossa (2015) menjelaskan bahwa, secara umum pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut, telah menerbitkan *Internal Control Framework* yang didalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

8. Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) yang baik (Purnamasari & Handayani, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto, untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Purnamasari & Handayani, 2015). Kompetensi merupakan

karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Organisasi juga harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pemberian pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadikan karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara lebih efektif dan berguna untuk mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhan akan pelatihan (Purnamasari & Handayani, 2015).

9. Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal selalu terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan kepada organisasi dari organisasi lain dimana organisasi tersebut tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (Purnamasari & Handayani, 2015). DiMaggio (1983) juga menyatakan bahwa tekanan eksternal berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk

legitimasi. Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Purnamasari & Handayani, 2015). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi akan bersifat formalitas saja karena hanya ditujukan untuk memperoleh legitimasi, khususnya terkait penerapan transparansi laporan keuangan.

Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen. Ketika proses tersebut berhasil dilaksanakan tentu proses transparansi laporan keuangan mengalami peningkatan (Purnamasari & Handayani, 2015).

10. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen manajemen terbentuk pada dasarnya karena adanya komitmen karyawan (individu). Aranya, et al. (1981) mendefinisikan komitmen manajemen sebagai berikut: (1) Sebuah kepercayaan dan

penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari organisasi dan atau profesi. (2) Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan atau profesi. (3) Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi.

Masruroh & Praptoyo (2015) menjelaskan bahwa karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Karyawan akan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel/Judul Penelitian	Hasil
1.	Fardian (2014)	Dependen : Transparansi Laporan Keuangan Independen : Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel/Judul Penelitian	Hasil
2.	Purnamasari dan Handayani (2015)	Dependen : Transparansi Laporan Keuangan Independen : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen	Sumber daya manusia dan komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan, tetapi tekanan eksternal berpengaruh signifikan.
3.	Rossa (2015)	Dependen : Transparansi Laporan Keuangan Independen : Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal dan Komitmen Pimpinan	Pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi.
4.	Apriliani, dkk. (2015)	Dependen : Transparansi Laporan Keuangan Independen : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.
5.	Masruroh & Praptyo (2015)	Dependen : Transparansi laporan keuangan Independen : Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kapasitas sumber daya	Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kapasitas sumber daya berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

(Lanjutan) Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel/Judul Penelitian	Hasil
6.	Andriyani (2016)	Dependen : Transparansi laporan keuangan Independen : Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Tekanan eksternal, komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh.
7.	Yuliani (2017)	Dependen : Transparansi Laporan Keuangan Independen : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik <i>Kualitatif</i> , Aksesibilitas dan Pengendalian Internal	Karakteristik <i>kualitatif</i> dan pengendalian internal berpengaruh positif. Sedangkan <i>aksesibilitas</i> dan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif.

Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSAP No. 1 menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Dalam hubungannya dengan teori keagenan maka OPD sebagai agen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat, yang dilakukan setransparan mungkin tanpa ada kecurangan. OPD sebagai agen perlu memperhitungkan biaya untuk menunjang transparansi agar menjadi lebih baik, maka dari itu untuk melaksanakan tujuan pemerintahan yang transparan perlu dipertimbangkan *bonding cost*.

Apabila penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku maka semakin dapat diandalkan transparansinya, karena PSAP No. 1 telah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Penelitian Apriliani, dkk (2015) menunjukkan

hasil bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

H1. Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pengaruh Karakteristik Kualitatif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa, menurut PSAP No. 1, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan teori keagenan, hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi OPD yang merupakan agen untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Sehingga mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi dalam laporan keuangan. Maka dari itu OPD perlu mempertimbangkan besaran *bonding cost* untuk mencapai tujuan tersebut.

Adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka peran dari para pegawai di dalamnya diperlukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur, tepat waktu, dapat dibandingkan dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pengguna dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga transparansi laporan keuangan akan tercapai dengan baik. Hasil penelitian Apriliani dkk. (2015) dan Yuliani (2017) menunjukkan hasil bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

H2. Karakteristik Kualitatif Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Apriliani, dkk. (2015) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa tinggi tingkat penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi. Dalam hal ini pengguna informasi dapat dilihat dari sisi internal OPD maupun eksternal dari OPD, yang bisa saja pemerintah pusat ataupun masyarakat. Dalam hubungannya dengan

teori keagenan, kewajiban OPD memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pemangku kepentingan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terutama oleh masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan keagenan yang mungkin akan terjadi, maka OPD perlu meyakinkan bahwa akses informasi keuangan yang mereka berikan telah memadai bagi para pencari informasi. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas ini tentunya OPD perlu mempertimbangkan *bonding cost*.

Adanya aksesibilitas yang diterapkan diharapkan akan mampu menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan laporan keuangan. Maka dukungan dari para pegawai dalam mewujudkan aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan perannya, agar transparansi laporan keuangan dapat tercapai. Semakin baik akses yang diberikan kepada para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi keuangan daerah maka semakin baik transparansi laporan keuangan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian Apriliani, dkk (2015) menunjukkan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

H3. Aksesibilitas Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan daerah. OPD sebagai pelaksana atau agen pemerintah daerah mengemban tugas untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tujuan organisasi yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi dapat tercapai. Dalam menjalankan proses pengendalian di dalam tubuh pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan mampu terbuka dan transparan dalam melakukan setiap kewajibannya (Yuliani, 2017). Jadi, dalam kaitannya dengan teori keagenan pemerintah daerah sebagai agen dari pemerintah pusat diharapkan mampu melaksanakan pengendalian internal dengan menjunjung prinsip transparansi terhadap laporan keuangan, agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Pemerintah pusat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal untuk memastikan bahwa OPD telah melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik sesuai yang diharapkan oleh prinsipal. Maka dalam hal ini pemerintah pusat berperan dalam *monitoring cost*.

Perwujudan pengendalian internal yang diinginkan perlu didukung oleh para pegawai yang ada di dalamnya, maka kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku harus dipenuhi oleh para pegawai OPD. Semakin terarahnya pengendalian internal di dalam OPD maka pengendalian transparansi laporan keuangan akan mudah dicapai. Penelitian Rossa (2015) dan Yuliani (2017) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

H4. Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi pada salah satu fungsi pekerjaan yang spesifik (Fardian, 2014). OPD sebagai agen dari pemerintah daerah, apabila sumber daya manusianya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya akan menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, di antaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang

ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan (Purnamasari & Handayani, 2015), maka kompetensi sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk mencapai transparansi laporan keuangan yang baik. Kepatuhan para pegawai terhadap peraturan yang telah ditentukan, juga menjadi sebagai salah satu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi hal yang tidak dapat terlepas dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, karena dalam penyusunan laporan keuangan juga telah ditentukan peraturan-peraturan agar terhindar dari kesalahan informasi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten maka OPD akan menggunakan *bonding cost* untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat meningkatkan transparansi.

Sesuai dengan teori kepatuhan melalui perspektif instrumental, pegawai yang bekerja di OPD memiliki kewajiban untuk bekerja dengan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta harus menjalankan peraturan yang sudah ada, di sisi lain mereka tentunya akan melakukan pekerjaannya dengan menuntut gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai motif kepentingan pribadi. Sehingga nantinya jika pengaruh sumber daya manusia meningkat, maka tentunya transparansi laporan keuangan dapat meningkat. Hasil penelitian

Fardian (2014) dan Masruroh dan Praptyo (2015) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan OPD.

H5. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

DiMaggio (1983) menyatakan bahwa tekanan eksternal berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi. Tekanan eksternal yang sangat berpengaruh adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Purnamasari & Handayani, 2015). Tekanan eksternal membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan semestinya, proses tersebut dilakukan dengan lebih terbuka seperti menggunakan tenaga auditor eksternal yang bersifat independen, ketika proses tersebut berhasil dilaksanakan tentu proses transparansi laporan keuangan mengalami peningkatan (Purnamasari & Handayani, 2015).

Dalam kaitannya dengan teori kepatuhan dari perspektif komitmen normatif melalui legitimasi maka pemerintah pusat akan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan, karena telah dipercaya untuk

mengelola pemerintahan di daerahnya, begitu juga pemerintah daerah terhadap OPD. Semakin baik peraturan yang diberikan untuk menjalankan pelaporan keuangan tersebut, semestinya akan meningkatkan transparansi laporan keuangan yang menjadi lebih baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2016), Purnamasari & Handayani (2015), dan Rossa (2015) telah membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

H6. Tekanan Eksternal berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

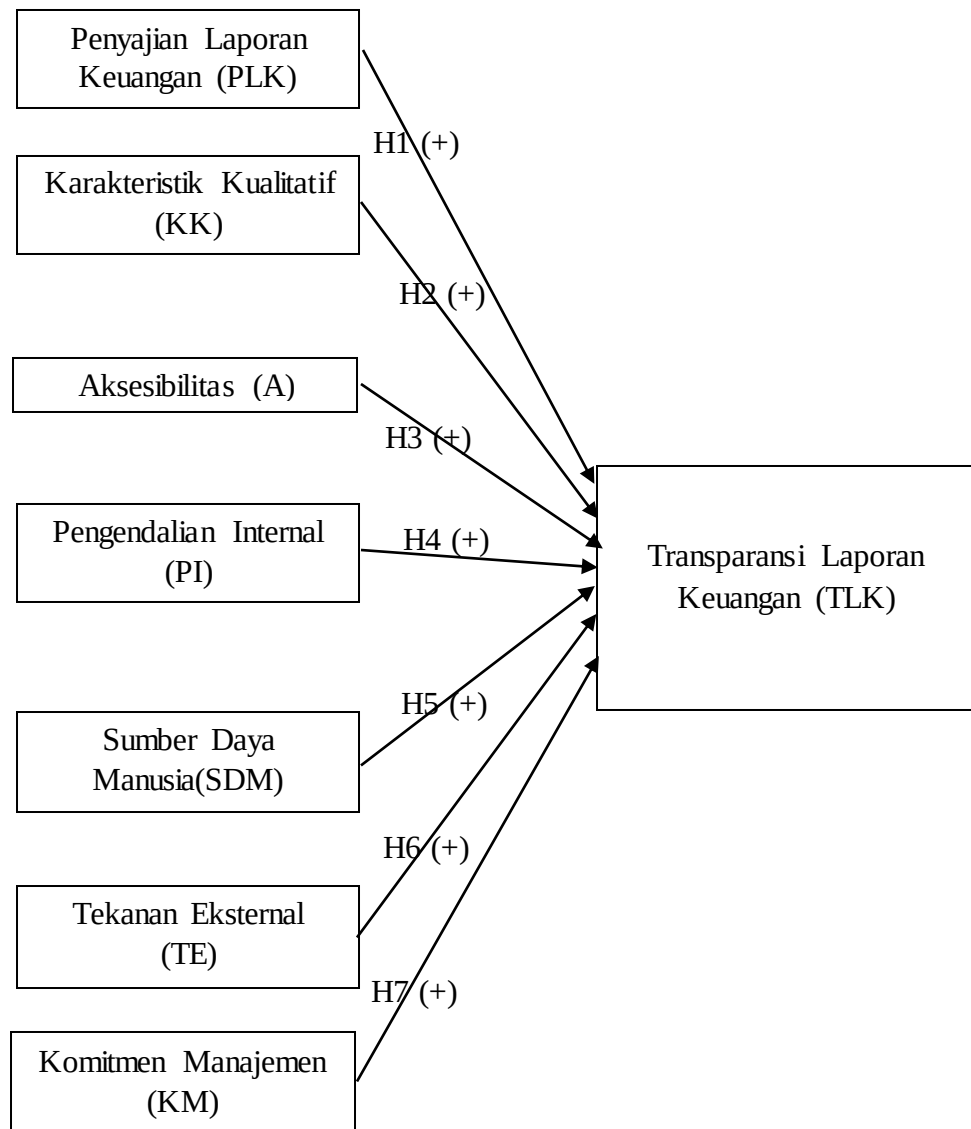
g. Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masruroh & Praptoyo (2015) menjelaskan bahwa karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Karyawan akan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan teori kepatuhan dari perspektif komitmen normatif melalui moralitas personal, komitmen manajemen harus dimiliki jika seseorang sudah memasuki suatu organisasi. Artinya

seseorang tersebut harus mematuhi peraturan yang telah disepakati sebagai wujud komitmen manajemen. Para pegawai harus memiliki loyalitas terhadap manajemen sebagai faktor pendukung untuk mencapai transparansi laporan keuangan. Di sisi lain, para pegawai juga perlu mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh OPD dan pemerintah pusat untuk mencapai transparansi laporan keuangan. Semakin baik dan terarahnya komitmen manajemen tersebut terhadap transparansi maka dapat dipastikan pelaksanaan transparansi dalam laporan keuangan tersebut akan baik. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Andriyani (2016) dan Rossa (2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

H7. Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan OPD Kota Magelang yang tersebar di 57 OPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah: (a) Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD. (b) Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan. (c) Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas OPD. Penentuan kriteria responden ini dikarenakan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan informasi keuangan di tiap-tiap OPD.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Penelitian metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Sedangkan data primer adalah kegiatan pengambilan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2012 : 139).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang akan dituju. Setelah kuesioner yang diisi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyeleksi kuesioner yang tidak lengkap agar tidak ikut serta dalam analisis.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
Variabel Independen Transparansi Laporan Keuangan (TLK)	Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.	Instrumen 8 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kemudahan akses laporan keuangan, 2) Ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan, 3) Fasilitas keterbukaan informasi yang diberikan untuk masyarakat, 4) Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Variabel Dependen Penyajian Laporan Keuangan (PLK)	Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).	Instrumen 8 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kesesuaian pelaporan dengan SAK, 2) Kelengkapan laporan keuangan,

(Lanjutan) Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
		3) Penggunaan basis akrual dalam pencatatan, 4) Kecukupan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Karakteristik Kualitatif (KK)	Yuliani (2017), menyatakan bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 01 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas.	Instrumen 10 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Kelengkapan laporan keuangan, 2) Ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan, 3) Keandalan laporan keuangan sebagai tolak ukur untuk penyusunan anggaran, 4) Kejujuran dalam laporan keuangan,

(Lanjutan) Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
		5) Kebebasan laporan keuangan dari kesalahan yang bersifat material, 6) Kehandalan laporan keuangan. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Aksesibilitas (A)	Apriliani, dkk. (2015) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik.	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan, 2) Kemudahan akses dalam pemerolehan informasi laporan keuangan. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).

(Lanjutan) Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
Pengendalian Internal (PI)	Rossa (2015) menjelaskan bahwa, secara umum pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu.	Instrumen 9 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Yuliani, 2017) : 1) Penerapan kode etik di dalam instansi, 2) Pengawasan yang dilakukan, 3) Pembagian tugas dan jabatan, 4) Penerapan manajemen risiko, 5) Kesesuaian pemberian otorisasi, 6) Pengawasan kinerja, 7) Penerapan sistem informasi. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Purnamasari & Handayani, 2015).	Instrumen 4 butir pernyataan dengan indikator sebagai berikut (Purnamasari & Handayani, 2015) : 1) Pemahaman tentang <i>job description</i>,

(Lanjutan) Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
		2) Pemahaman tentang transparansi laporan keuangan, 3) Melaksanakan prosedur akuntansi, 4) Memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Tekanan Eksternal (TE)	Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (Purnamasari & Handayani, 2015).	Instrumen 6 butir pernyataan, dengan indikator sebagai berikut (Purnamasari & Handayani 2015) : 1) Terbitnya undang - undang dan peraturan tentang transparansi, 2) Tuntutan pihak pihak terkait, 3) Tekanan media masa, 4) Kritik dari Masyarakat, 5) Perhatian lembaga kemasyarakatan,

(Lanjutan) Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran dan Indikator
		6) Tuntutan pengusaha dan komunitas bisnis. Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).
Komitmen Manajemen (KM)	Masruroh & Praptoyo (2015) menjelaskan bahwa karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Karyawan akan menumbuhkan loyalitas tinggi terhadap organisasinya untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi.	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator berikut (Purnamasari & Handayani 2015) : 1) Keinginan manajemen puncak, 2) Membenahi kemampuan dan keterampilan staf, 3) Integritas yang tinggi, 4) Membangun budaya etis, 5) Kebutuhan OPD, Pengukuran variabel menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 (sangat tidak setuju) hingga poin 5 (sangat setuju).

Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2018

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

a. Data

Statistik deskriptif merupakan metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang untuk membuat gambaran variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi, yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewnes*. Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan di OPD.

b. Responden

Statistik deskriptif responden menunjukkan karakteristik atau demografi responden yang digunakan dalam penelitian mencakup nama instansi, umur, jabatan, lama bekerja/menjabat, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan pendidikan terakhir yang ditempuh.

2. Uji Kualitas Data

Uji yang dilakukan dalam uji kualitas data yaitu :

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat, betul-betul dapat mengukur apa yang akan diukur (Ghozali, 2016).

Dalam pengujian validitas tersebut digunakan *Confrimatory Factor Analysis (CFA)*. *Confrimatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interprestasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90

derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi orthogonal dapat berbentuk Quartimax, Varimax, Equimax dan Promax (Ghozali, 2013:55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor atau *Confrimatory Factor Analysis* (Ghozali, 2013:57).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 43), yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* $\leq 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$TLK = \beta_1 PLK + \beta_2 KK + \beta_3 A + \beta_4 PI + \beta_5 SDM + \beta_6 TE + \beta_7 KM + e$$

Keterangan :

TLK	= Transparansi Laporan Keuangan
β	= Koefisien regresi
PLK	= Penyajian Laporan Keuangan
KK	= Karakteristik Kualitatif
A	= Aksesibilitas
PI	= Pengendalian Internal
SDM	= Sumber Daya Manusia
TE	= Tekanan Eksternal
KM	= Komitmen Manajemen
e	= error

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghazali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

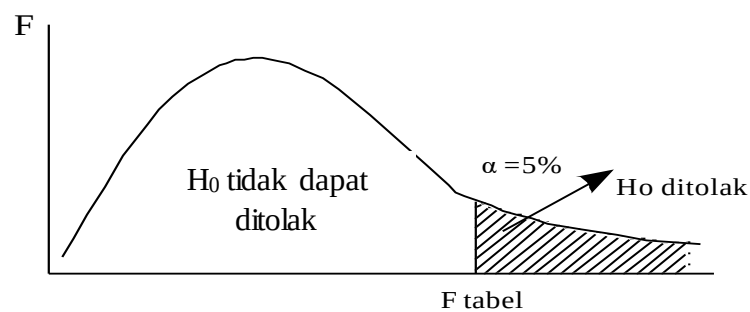
dependen amat terbatas. Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016)

2. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F mengukur *goodness of fit*, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka hipotesis diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n - k - 1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria berikut :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (fit).
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit).



Gambar 3.1
Nilai Kritis Uji F

3. Uji t

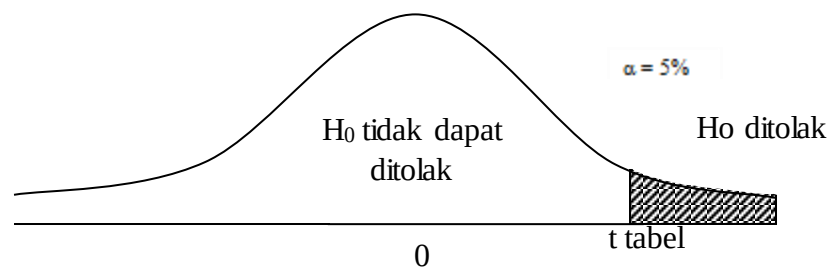
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t ($p\text{-value}$) $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a

diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji Statistik t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di antaranya yaitu penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, pengendalian internal, tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan sumber daya manusia di OPD Kota Magelang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di OPD Kota Magelang dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 121 eksemplar dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 109 eksemplar. Dari hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* sebesar 0,730 yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, pengendalian internal, sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen dalam menjelaskan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 73% dan sisanya 27% dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model penelitian ini.

2. Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu $42,728 > 2,10$ maka kesimpulannya H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya model yang digunakan telah bagus (*fit*).
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, sumber daya manusia, dan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan karakteristik kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Artinya semakin meningkatnya karakteristik kualitatif, aksesibilitas, dan tekanan eksternal maka akan meningkat pula transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

B. Keterbatasan

1. Hasil uji R^2 menunjukkan jika penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, pengendalian internal, sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen dalam menjelaskan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 73% dan sisanya 27% dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model penelitian ini. Hal tersebut mengartikan bahwa masih ada beberapa faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah saja yaitu OPD Kota Magelang. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasikan hasil penelitian.

3. Kurang fokusnya variabel komitmen manajemen di level responden individu, karena komitmen manajemen dirasa lebih pantas dilakukan pada penelitian pada tingkat organisasi.

C. Saran

Dari keterbatasan-keterbatasan penelitian yang telah ditemukan dan disampaikan, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas yang berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian di OPD kabupaten/kota lainnya agar generalisasi hasil dapat menjadi lebih baik.
3. Komitmen manajemen kemungkinan dapat diganti dengan komitmen organisasi di level sampel individu untuk hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Andriyani, L. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi. *Jom FEKON*, 3(1), 204–208.
- Apriliani, N. K. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Atmoko, M. H. (2017, September 7). Kota Magelang Raih 2 Penghargaan UGM. Retrieved from <https://jateng.antarane.ws.com/detail/kota-magelang-raih-2-penghargaan-ugm.html>
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2017). *Pedoman Penulisan Skripsi Artikel*. Magelang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- BPK. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017, 1–377.
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–18.
- Gewati, M. (2017, September 12). Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indobesia. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/14170551/bunh-diri-kemiskinan-dan-korupsi-di-indonesia>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inayah, Anila Ulin. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Magelang : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Jateng, R. M. (2017, July 2). Setelah 10 Tahun, Pemkot Magelang Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Retrieved from <http://metrojateng.com/setelah-10-tahun-pemkot-magelang-kembali-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian/>
- Jogja, T. (2017, September 13). Terkait Pengelolaan Keuangan, Kota Magelang

Raih Penghargaan dari Kemenkeu. Retrieved from <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/13/terkait-pengelolaan-keuangan-kota-magelang-raih-penghargaan-dari-kemenkeu?page=all>

Pemerintah Kota Magelang. (2016). Opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2016.

Pemerintah Kota Magelang. (2018). Subdomain OPD.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerin Tahan Vol. 2, No.1*.

Masruroh, A. F., & Praptoyo, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(7), 1–20.

Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 65–75.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01. (2015). Retrieved from <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-01/>

Prof. Dr. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Prof. Dr. Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Untuk Perbaikan Kinerja dan Pengembangan Ilmu Tindakan)*. (M. E. Safitri Yosita Ratri, S.Si, M.Pd., Ed.), 1 (1st ed.). Bandung: Alfabeta.

Purnamasari, R. D. W., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Akuntansi*, 4(2), 1–17. Retrieved from wulanfenly@gmail.com

Riyadi, T. (2017). Raih Predikat WTP, Pemkot Digelontor Dana Segar Rp 5 Miliar. Retrieved from <http://magelang.sorot.co/berita-2795-raih-predikat-wtp-pemkot-digelontor-dana--segar-rp-5-miliar.html>

Rossa, A. A. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Sabarno, H. (2008). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sistem Pengendalian Menurut COSO. (2015). Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. United States of America: Yale University Press. Retrieved from <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=135926>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. (2008). Retrieved from <http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/UU14th2008.pdf>
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.